



Kabar Pemilu Nomor 8, Juni 2009

Pemilu Aceh: Sebuah Keniscayaan

Pemilu di Indonesia diselenggarakan lima tahun sekali, yang terakhir berlangsung bulan April 2009. Tetapi kali ini pemilu di Aceh, yang terletak di ujung pulau Sumatra, sangatlah berbeda. Untuk pertama kalinya, masyarakat Aceh memberikan suara dalam pemilihan yang bebas setelah didera konflik selama hampir tiga dekade. Gerakan Aceh Merdeka yang sebelumnya merupakan gerakan pemberontak sekarang berubah menjadi partai politik dan mempunyai kandidatnya sendiri dalam pemilihan daerah.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang warganya diperbolehkan mendirikan partainya sendiri. Enam partai lokal sudah diakui secara resmi: Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (PSIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Bersatu Aceh (PBA), dan Partai Aceh Aman dan Sejahtera (PAAS).

Turut sertanya partai lokal merupakan terobosan yang sungguh penting, suatu revolusi minor dalam konteks sistem politik kesatuan Indonesia. Pemberontakan yang berkecamuk berturut-turut sejak lahirnya Republik Indonesia tahun 1945, tak hanya di pinggiran tetapi juga di tengah-tengah pulau Jawa, memperkuat pemberlakuan sistem yang sangat tersentralisasi. Meskipun pada tahun 1949 Indonesia menjadi negara federal, itu hanya berlangsung selama setahun lebih sedikit. Sejumlah pemberontakan, termasuk yang terjadi di Aceh, mengakibatkan adanya konsensus pada tahun 1958 di antara elite penguasa di Jakarta bahwa sistem kesatuan merupakan pilihan satu-satunya.

Pemberontakan yang meletus di Aceh tahun 1976 di bawah pimpinan GAM, mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Setelah Suharto yang otoriter dipaksa turun pada bulan Mei 1998, terjadi banyak kemajuan dalam peristiwa politik di Aceh. Sementara militer berusaha menghancurkan gerakan independen, para pengambil keputusan di Jakarta menyadari bahwa penyelesaian politik merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan. Aceh menjalani beberapa tahapan proses perdamaian, dengan dialog sebagai benang merahnya.

Turut sertanya partai lokal merupakan terobosan yang sungguh penting, suatu revolusi minor

Pemberontakan GAM memiliki semua elemen pemberontakan yang tersebar luas: resistensi bersenjata, pasukan Indonesia yang tersentralisasi yang mencoba menumpas pemberontakan, masalah

pengungsi yang besar, dampak yang mengancurkan dari Tsunami di bulan Desember 2004, ekonomi yang rusak parah, dan pemerintahan GAM dalam pengungsian yang banyak diberitakan.

Proses perdamaian di Aceh melahirkan kesepakatan pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Nota Kesepahaman yang ditanda-tangani oleh GAM dan pemerintah Indonesia menjadi dasar bagi suatu perdamaian yang komprehensif. MoU ini merupakan dasar bagi pendirian partai lokal, yang dibentuk setelah dibuatnya undang-undang khusus tentang Aceh di Jakarta.

Pembangangan pemilih

Pemilu April 2009 di Aceh betul-betul bersejarah. Masyarakat Aceh telah lama memiliki tradisi pemerintahan sendiri di bawah kesultanan. Pada permulaan abad 20, mereka menentang penjajahan Belanda dan memberontak melawan pemerintah pusat yang dikendalikan dari Jakarta. Pada tahun 1950-an, gerakan yang disebut Darul Islam muncul untuk melawan pemerintahan Sukarno; kesepakatan tercapai hanya setelah Aceh diberi status otonomi khusus.

Tampak gamblang bahwa selama konflik yang berkepanjangan itu terdapat pola yang jelas di Aceh, berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Di bawah Suharto, sistem politik yang dianut pada dasarnya adalah sistem satu partai yang memperbolehkan dua partai kecil lain untuk turut ambil bagian dalam pemilu untuk memberikan kesan bahwa sistem Orde Baru Suharto adalah sistem multipartai. Golkar (Golongan Karya) adalah partai yang berkuasa sementara PDI (Partai Demokrasi Indonesia) merupakan gabungan antara partai nasionalis dan partai Kristen, sedangkan PPP (Partai Pembangunan Persatuan) adalah federasi Muslim. Meskipun 'golkarisasi' berjalan mulus di provinsi lain dengan berbagai cara termasuk kekerasan brutal dan suap, para pemilih di Aceh secara persisten menentang sistem itu

dan memberikan sejumlah besar suaranya bagi PPP.

Dalam ritual lima-tahunan Pemilu, Golkar selalu memenangkan mayoritas di semua provinsi, kecuali Aceh. Barulah pada tahun 1994, dalam pemilu terakhir di bawah Suharto, pemilih di Aceh akhirnya menyerah pada janji-janji dan proyek-proyek Golkar. Lalu di tahun 1999, setelah ambruknya Suharto, Golkar kembali menang, tetapi kali ini dukungannya telah luntur.

Dari senapan ke surat suara

Pemilu bulan April 2009 adalah bukti utama keberhasilan kesepakatan damai yang dicapai tahun 2005. Pemerintah pusat bersedia memberikan otonomi yang besar untuk Aceh sementara masyarakat Aceh bersedia menerima lambaian perdamaian dari Jakarta. GAM melepaskan tuntutan atas kemerdekaan dan menyerahkan sebagian besar senjatanya. Banyak pejuang/gerilyawan dalam sekejap mata saja menjalankan tugas menjaga proses perdamaian sementara pada waktu yang sama berpartisipasi dalam proses rekonstruksi setelah terjadinya Tsunami.

Pemilu itu adalah bukti utama keberhasilan kesepakatan damai

'Kembalinya' para gerilyawan ke masyarakat dan kembali menjalani hidup normal, seringkali merupakan bagian tersulit dalam proses perdamaian. Tak terelakkan, Aceh menghadapi masalah, tetapi secara relatif, reintegrasi pejuang GAM berjalan jauh lebih mulus daripada di tempat lain di seluruh dunia setelah terjadinya konflik.

Terdapat beberapa alasan untuk ini, yang terutama adalah sebagai gerakan akar rumput, GAM berhasil menyesuaikan diri

dengan baik dengan transformasi; anggotanya berubah dari pejuang menjadi pekerja di berbagai bidang perekonomian dan membantu menjaga proses perdamaian. Banyak aktivis GAM terpilih dalam pos-pos administratif dalam pemilihan daerah dan bahkan ada yang melejit ke posisi puncak menjadi gubernur provinsi, walikota atau bupati. Ledakan ekonomi, yang didukung oleh besarnya kontribusi berupa bantuan keuangan dari segenap penjuru dunia menyediakan banyak kesempatan bagi para mantan pejuang untuk berpartisipasi dalam kegiatan rekonstruksi.

Reintegrasi pejuang GAM berjalan jauh lebih mulus daripada di tempat lain di seluruh dunia setelah terjadinya konflik

Langkah cepat pembangunan

Serangkaian peristiwa di Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengubah wilayah ini secara dramatis. Terdapat dua peristiwa besar: kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM, hasil negosiasi yang dimulai tahun 2004 dan berakhir Agustus 2005; dan tsunami yang dahsyat yang menghancurkan-leburkan wilayah itu pada bulan Desember 2004. Kedua peristiwa ini merupakan titik balik bagi Aceh, secara politis maupun ekonomi.

Di balik kesepakatan damai dan program rekonstruksi besar-besaran setelah tsunami, pembangunan bergerak cepat. Dua lembaga penting didirikan. AMM (Aceh Monitoring Mission) dibentuk untuk mengawal proses perdamaian dan berkoordinasi dengan pakar-pakar dari negara-negara UE serta ASEAN. BRR, Badan Rekonsiliasi dan Rekonstruksi, mengambil alih tugas sulit untuk mengatur, mengkoordinasikan dan

mengawasi proyek-proyek rekonstruksi yang ditangani oleh badan-badan pemberi bantuan dari segenap penjuru dunia.

BRR menyelesaikan tugasnya tepat sebelum pemilu di bulan April 2009 dan diakui secara luas telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat sukses. BRR mencapai seluruh target rekonstruksi fisik- membangun rumah, sekolah, rumah sakit, jalan. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa Aceh tetap mempertahankan strukturnya sendiri dengan struktur dari kekuatan akar rumput dan struktur administratif Indonesia, dari gubernur hingga ke desa-desa. Berbeda dengan apa yang sering terjadi di daerah bencana lainnya di dunia, dana besar yang membanjir dari badan-badan asing tak menenggelamkan Aceh.

Kampanye

Hasil pemilu yang dicapai oleh partai lokal adalah sebuah keniscayaan; hasil jajak pendapat awal meramalkan kemenangan besar bagi Partai Aceh (PA) dan Partai SIRA (PSIRA). Partai nasional sangat buruk perolehannya dan berbeda jauh dengan provinsi-provinsi lain, keragaman spanduk dan selebaran agak terbatas. Di kubu-kubu GAM seperti Aceh Timur dan Aceh Utara, jalanan dipenuhi dengan spanduk dan bendera PA.

Di kubu-kubu GAM jalanan dipenuhi dengan spanduk dan bendera PA

Tetapi keadaan berubah dalam beberapa minggu sebelum pemilu. Kepemimpinan PA menjadi lebih menonjol daripada partai-partai lokal lainnya dan kini menjadi jelas bahwa ada rasa kurang suka di antara masyarakat terhadap partai-partai lokal yang lain.

Sejak awal, masyarakat Aceh menunjukkan dukungannya bagi tokoh-tokoh terkemuka di PA dan hampir tak menyisakan barang secuilpun bagi parta-partai lokal lainnya. Masyarakat Aceh yang memberikan suaranya memilih politik identitas dan tokoh yang paling menarik bagi mereka berasal dari PA. Adapun PSIRA dan PRA, meski memiliki catatan advokasi demokrasi yang mengesankan, mereka harus menelan pil pahit dalam pemilu 2009. Satu-satunya partai lokal lain yang memenangkan satu kursi dalam Dewan Provinsi Aceh adalah PDA, partai Muslim lokal.

Kedekatan hubungan politik muncul antara bagian-bagian dari GAM dan presiden yang saat ini berkuasa di Jakarta, SBY. Mayoritas masyarakat Aceh menyadari bahwa perdamaian yang berkelanjutan di Aceh akan lebih aman di tangan pemerintahan SBY. Ketika SBY mengunjungi Aceh dua minggu sebelum pemilu, ribuan masyarakat berkumpul di stadion utama di Banda Aceh untuk menyambutnya. Masa itu dikerahkan oleh Sofyan Daud, mantan komandan GAM dan juga tokoh terkemuka. Ini juga terjadi dalam skala yang lebih kecil pada wakil presiden Jusuf Kalla dari partai Golkar. Proses perdamaian itu sebetulnya sebagian besar merupakan hasil dari Kalla dan timnya. PD memenangkan sepuluh dari 69 kursi dalam dewan sementara Golkar mendapatkan 8 kursi.

Muncul koalisi baru antara bagian-bagian dari GAM dan SBY

Tetapi perlu dicatat bahwa meskipun memiliki dasar yang luas dan kampanye yang efektif, PA gagal memperoleh mayoritas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. PA memenangkan 33 dari 69 kursi dan tidak terlalu sukses di beberapa kabupaten/kota, termasuk di ibukota Banda Aceh. Terdapat mobilitas dan perubahan besar dalam komposisi penduduk di ibu kota.

Banyak warga non-Aceh yang mendapatkan pekerjaan yang baik dalam proyek rekonstruksi setelah Tsunami, yang mencerminkan pluralitas yang sehat dalam pemberian suara.

Dalam masa kerja parlemen mendatang, yang akan dimulai bulan Oktober, partai berikut akan menduduki kursi di DPRD Banda Aceh: Partai Demokrat dengan 8 kursi, PA 6 kursi, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 5 kursi, Golkar 3 kursi, PDA (Partai Demokrat Aceh, partai lokal) 3 kursi, PAN (Partai Amanat Nasional) 2 kursi dan PPP, PSIRA (partai lokal) serta PBB masing-masing 1 kursi. Jadi tak salah lagi bahwa terlepas dari mayoritas PA, pluralitas dalam peta politik Aceh telah terjaga.

pluralitas dalam peta politik Aceh telah terjaga

Hasil pemilu

Masyarakat Aceh turut serta dalam empat pemilihan pada tanggal 9 April: Pemilu untuk parlemen Indonesia, **DPR**; pemilihan daerah untuk dewan provinsi Aceh, **DPRA** (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), dan dewan tingkat kabupaten/kota **DPRK** (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota); serta **DPD** (Dewan Perwakilan Daerah) yang berbasis di Jakarta. Dua dari pemilihan itu, yang merupakan pemilihan daerah, yaitu untuk memilih anggota **DPRA** dan **DPRK**, lebih menarik karena partisipasi partai-partai lokal. Seperti yang telah diramalkan, terdapat perubahan besar personel dalam pemilihan-pemilihan ini.

Pemilihan bagi 69 kursi di **DPRA** (dewan perwakilan tingkat provinsi) menghasilkan lebih dari 80 persen wajah baru. Begitu juga dengan **DPRK**; terdapat banyak wajah baru yang menduduki 645 kursi di 23 kabupaten

dan kota. Tetapi, hanya ada lima perempuan yang terpilih dalam **DPRA**.

DPRA yang baru

Partai	Persentase	Kursi
Partai Aceh (lokal)	46,91%	33
Partai Demokrat	10,84%	10
Partai Golkar	6,63%	8
PAN	3,87%	5
PKS	3,80%	4
PPP	3,45%	3
PDA (lokal)	1,85%	1
PKB	1,41%	1
PBB	1,74%	1
PKPI	1,92%	1
PDI-P	1,01%	1
Partai Patriot	0,70%	1

Dalam pemilihan DPRK, hasilnya lebih mencengangkan. Di kubu GAM, PA sukses dan memenangkan mayoritas kursi. Di kabupaten Pidie, PA memenangkan 34 dari 45 kursi. PA juga merebut kemenangan besar di Aceh Utara, mendapatkan 32 dari 45 kursi. Di Aceh Timur, PA memenangkan 25 dari 35 kursi.

Tetapi di tempat-tempat di mana kelompok etnis tinggal, PA kurang dominan. Di Aceh Tengah, Partai Demokrat berhasil merebut 4 kursi sementara PA hanya mendapatkan 3 kursi. Berbagai partai lain mendapatkan 1 atau lebih kursi dari 31 kursi. Di Aceh Singkil, kabupaten yang agak terpencil di bagian barat daya, Golkar muncul sebagai pemenang, sementara di Bener Meriah dan Subulussalam, PAN adalah partai terbesar.

Pemilihan **DPR** diadakan untuk memilih anggota parlemen nasional di Jakarta. Aceh mendapat alokasi tujuh kursi dalam DPR. Hanya partai nasional yang boleh turut serta. Hasilnya adalah sbb:

Partai Demokrat (PD) memenangkan 6 kursi: Teuku Riefky Harsa, Nova Iriansyah, H.M. Ali Yacob, Mirwan Amir, Muh. Azhari dan Teuku Irwan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenangkan 2 kursi: Nasir Djamil and Raihan Iskandar

Partai Golongan Karya (Golkar) memenangkan 2 kursi: Sayed Fuad Zakaria dan Marzuki Daud

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memenangkan 2 kursi: Tengku Moh. Faisal Amin dan Teuku Taufiqulhadi

Partai Amanat Nasional (PAN) 1 kursi: H. Azwar Abubakar

DPD adalah badan legislatif yang relatif masih baru, dapat dibandingkan dengan senat di negara-negara lain. Setiap provinsi berhak memilih empat anggota DPD, yang akan bersidang di Jakarta. Calon anggota DPD seringkali merupakan gabungan antara beberapa karakteristik. Sering kali mereka merupakan tokoh masyarakat, tapi mereka juga lebih sering didukung oleh satu atau beberapa partai. Misalnya Tengku Abdurrahman, seorang mubaligh yang dikenal di banyak daerah di Aceh mendapatkan dukungan PA dan dengan demikian ia berhasil memenangkan kursi.

Anggota DPD

1 Tengku Abdurrahman BTM	234.118 suara
2. Bachrum Manyak	172,417 suara
3. Farhan Hamid	121,747 suara
4. A. Khalid	101,808 suara